

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Manajemen pengelolaan dana BOP PAUD di TK Aisyiyah Busthanul Athfal Kauman melalui serangkaian tahapan dan proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Proses perencanaan anggaran BOP PAUD disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022. Dalam pelaksanaannya, manajemen dana BOP PAUD didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOP PAUD sekolah, dewan guru, dan komite sekolah. Evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban telah dilakukan sesuai dengan pedoman penggunaan dana BOP PAUD. Manajemen pembiayaan ini bertujuan mencapai visi dan misi sekolah TK Aisyiyah Busthanul Athfal Kauman sesuai dengan pedoman penggunaan dana BOP dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Meskipun demikian, manajemen pengelolaan dana BOP PAUD di TK Aisyiyah Busthanul Athfal Kauman tidak selalu berjalan lancar. Salah satu kendala utamanya adalah proses pencairan dana yang lambat, yang mengganggu operasional sekolah. Selain itu, tidak adanya staf kepegawaian atau tenaga kependidikan yang memiliki keterampilan atau kompetensi sebagai bendahara BOP PAUD juga menjadi hambatan.
3. Untuk mengatasi keterlambatan pencairan dana BOP PAUD ke rekening sekolah, solusi yang diambil adalah dengan meminjam dana talangan dari uang SPP atau pihak ketiga yang menjadi rekanan yang menyediakan barang atau jasa. Terkait masalah ketiadaan tenaga administrasi yang sesuai dengan jurusannya untuk mengelola dana BOP PAUD, sekolah negeri dapat menugaskan seorang guru menjadi bendahara BOP PAUD.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang penulis ajukan yaitu sebagai berikut:

1. Sekolah diharapkan menggunakan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP PAUD) yang diterima dari pemerintah dengan sebaik-baiknya untuk keperluan pembiayaan sekolah guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
2. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengelolaan dan penggunaan dana BOP PAUD di sekolah agar sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah harus memperhatikan kendala-kendala yang muncul dalam pengelolaan dana BOP PAUD di sekolah agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.